

**“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI PROVINSI JAMBI”**

SKRIPSI


Oleh:

NOVITA. Y

06951035



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

	No. Alumni Universitas	NOVITA.Y	No. Alumni Fakultas
	BIODATA		

a). Tempat/Tgl lahir: Muara Bulian, 6 Januari 1988 b). Nama Orang Tua: M. Yusak Abdi dan Herawati c). Fakultas: Ekonomi d). Jurusan: Ilmu Ekonomi e). No.Bp: 06 951 035 f). Tgl Lulus: 30 Agustus 2010 g). Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK: 3,28 i). Lama Studi: 4 tahun j). Alamat Orang Tua: Jl.Jend. Sudirman No.25 Muara Bulian Jambi.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI JAMBI

Skripsi S1 Oleh: **Novita. Y.**, Pembimbing: **Drs. H. Masrizal, M.Soc.Sc**

Abstrak

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari pajak daerah, dimana Pajak Kendaraan Bermotor merupakan sumber penerimaan pajak daerah terbesar guna membiayai pembangunan di Provinsi Jambi. Perkembangan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Provinsi Jambi. Beberapa faktor yang diperkirakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan adalah PDRB, Jumlah Penduduk, jumlah Kendaraan Bermotor dan Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor. Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder dari tahun 2000-2009. Setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan persamaan regresi ternyata faktor yang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan adalah Jumlah penduduk dan Jumlah Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu PEMDA perlu mengatur jumlah penduduk dan perkembangannya sehingga diharapkan lebih berperan meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di masa mendatang. Di samping itu PEMDA juga perlu mendorong wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam membayar pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan sistem pendataan yang lebih baik dan berkualitas.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada 30 Agustus 2010, telah disetujui oleh pembimbing dan penguji.

Tanda Tangan	1.	2.	3.
Nama Terang	Drs. H. Masrizal, M.Soc. Sc	Laksmi Dewi, SE, M.Si	Sosmiarti, SE, M.Si

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi : **Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec.DEA, Ing**
NIP : 132 317 325

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/ Unive. : **Andalas** dan mendapat nomor Alumnus :

Petugas Fakultas / Universitas Andalas		
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak tanggal 1 Januari tahun 2001 Pemerintah secara resmi telah menyatakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diganti dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004. Mulai sejak itu, administrasi Pemerintahan dan sistem Pembangunan Daerah di Indonesia mengalami perubahan yakni dari sistem sentralistik menjadi desentralisasi. Pelaksanaan sistem pemerintahan yang baru tersebut dikenal juga dengan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah Kabupaten dan daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling efektif adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah (Muhammad Riduansyah, 2003)

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, maka wewenang pemerintah daerah semakin besar dan nyata. Untuk itu, dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah kelangkaan otonomi hanya dapat diwujudkan dengan adanya sumber-sumber penerimaan daerah yang selalu meningkat dan pasti. Pelaksanaan otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk mewujudkan daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga dengan demikian diharapkan dapat dicapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan yang optimal mungkin.

Menurut Hamdani Aini (1985) Pajak daerah adalah Pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga sebagai badan hukum politik.

Didalam UU No. 34 Tahun 2000 dijelaskan Pajak daerah selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Wewenang mengenakan pajak atas penduduk setempat untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsur yang penting dalam setiap pemerintah daerah.

Dengan semakin besarnya kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka peranan keuangan daerah akan semakin penting.

Di dalam Undang – undang No.33 Tahun 2004 dikemukakan bahwa sumber – sumber penerimaan keuangan daerah terdiri dari beberapa bagian, diantaranya:

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Selama Periode analisis (2000-2009) penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi mengalami peningkatan yang cukup baik setiap tahunnya. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan PDRB, Produktivitas karyawan pemungut Pajak Kendaraan Bermotor dan Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi.
2. Berdasarkan hasil temuan empiris yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa PDRB mempunyai pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dapat dilihat dari uji t-test dimana hasil yang didapat untuk PDRB (X_1) adalah sebesar 0,640, sedangkan nilai t-tabel pada tingkat kepercayaan 95% adalah sebesar 2,306. maka nilai t-test untuk PDRB (X_1) lebih kecil dari t-tabel yang berarti PDRB tidak signifikan mempengaruhi jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y).
3. Jumlah Penduduk mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi. Hal ini dapat dilihat dari uji t-test dimana hasil yang didapat untuk jumlah

DAFTAR PUSTAKA

- Davey, K.J, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. UI Press, Jakarta, 1988
- Gede, M dan Gede, J, *Hukum Pajak*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 1995
- Gujarati, Damodar (1997), *Ekonometrika Dasar*, Erlangga: Jakarta.
- Hamdani, Aini, *Perpajakan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Kesit Bambang Prakoso, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2003
- Kuncoro, Mudrajad, *Metode Kuantitatif*, Edisi Ke - 3, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2007
- Lains, Alfian, *Ekonometrika : Teori dan Aplikasi*, Universitas Andalas, Padang, 1989
- Mangkoesoebroto, Guritno. *Ekonomi Publik*. BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta, 2001
- Munawir, S, *Pokok-Pokok Perpajakan*. Liberty, Yogyakarta, 1992
- Musgrave Richard A & Peggy B, *Keuangan Negara Dalam Teori Ekonomi dan Praktek*, Erlangga, Jakarta, 1999
- Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia No. 65, *Tentang Pajak Daerah*, Tahun 2001
- Refianto, J, *Produktivitas dan Pengukuran*, lembaga SIUP, Jakarta, 1980
- Riduansyah, Mohammad (2003), *Kontribusi Pajak Daerah dan retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*, MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, VOL. 7, NO. 2
- Sadono Sukirno, *Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, LPEE-UI, Jakarta, 1985
- Samodra, A, Azhari. *Perpajakan Di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, Gramedia, Jakarta, 1995